# BAB VI

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Sulawesi Barat dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi. Strategi dapat dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

## 6.1 Strategi Pembangunan

Dalam mencapai visi percepatan pertumbuhan ekonomi dan selaras dengan strategi RPJMN 2010-2014, maka ditetapkan strategi utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yaitu pro pertumbuhan (pro growth), pro pembukaan lapangan kerja (pro jobs), pro penanggulangan kemiskinan (pro poor), pro pembangunan manusia (pro human development) dan pro penanggulangan kemiskinan (pro environment). Melalui keseluruhan strategi ini, dengan inti pada pro growth, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (growth with equity). Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan **9M** yaitu: (1) Makin berkualitas dan profesionalnya aparatur dalam memberikan pelayanan publik (misi 1); (2) Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, keuangan dan rekayasa teknologi (misi 1); (3) Makin luasnya cakupan atau spektrum pembangunan ekonomi daerah melalui upaya diversifikasi teknologi guna pemanfaatan sumberdaya alam, teknologi produksi dan pengolahan, serta peningkatan volume konsumsi melalui publikasi dan promosi (misi 2); (4) Makin terfasilitasinya pihak swasta termasuk lembaga-lembaga keuangan dan lembaga swadaya masyarakat dalam program investasi dan pengembangan usaha guna percepatan proses pembangunan ekonomi daerah (misi 2); (5) Makin meningkat dan meluasnya ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi vital yang signifikan

pengaruhnya pada pengembangan agroindustri, industri pertambangan, perdagangan dan pariwisata (misi 2); (6)Makin meningkatnya kelancaran arus barang, jasa, dan informasi lintas daerah (regional, nasional dan global) melalui perbaikan dan penguatan kapasitas jaringan transportasi baik darat, laut, maupun udara guna peningkatan interkoneksitas wilayah Sulawesi Barat dengan wilayah lainnya serta penguatan pengelolaan basis data potensi dan produksi daerah untuk kepentingan perdagangan barang dan jasa (misi 2); (7) Makin banyaknya kesempatan kerja tercipta sehingga semakin banyak keluarga di Provinsi Sulawesi Barat yang dapat dilepaskan dari perangkap kemiskinan, dan semakin kuatnya perekonomian untuk menghadapi berbagai kendala (misi 2); (8) Makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia baik dari segi pendidikan maupun kesehatan (misi 3); (9) Makin optimalnya penerapan kebijakan dan pelaksanakan pembangunan yang memperhatikan aspek pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (misi 4). Dengan penanda 9 M ini menunjukkan bahwa strategi pro growth, pro jobs, pro poor, pro human development dan pro environment telah memberikan arah pembangunan yang benar dan hasil yang diinginkan.

## 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat menitik beratkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka percepatan pembangunan diperlukan adanya strategi utama daerah yang kemudian akan ditetapkan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2010-2014) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

### Arah Kebijakan Pembangunan Menurut RPJMN 2010-2014, RPJPD Sulawesi Barat dan RTRW Sulawesi Barat

Arah kebijakan pembangunan wilayah Sulawesi dalam RPJMN 2010-2014 Buku III halaman 21 adalah: pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan; Pengelolaan hasil rotan; mengembangkan bioenergi; serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf intenasional. Sesuai RTRWN pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong perkembangan peran Pulau Sulawesi sebagai salah satu wilayah yang memiliki peluang-peluang eksternal cukup besar; (2) mengembangkan komoditas unggulan

Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya; (3) memprioritaskan kawasan-kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka pencapaian pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah, termasuk pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan; (4) memanfaatkan potensi sumber daya di darat dan di laut secara optimal serta mengatasi potensi konflik lintas wilayah provinsi yang terjadi di beberapa wilayah perairan dan daratan; (5) mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional, khususnya bagi sawah-sawah beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan; (6) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya, dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya dalam menciptakan daya saing wilayah; (7) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40 persen dari luas Pulau Sulawesi dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budidaya; (8) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya sebagai asset sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya tradisional dan kearifan lokal; (9) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan; dan (10) mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Pusat-pusat pengembangan di Pulau Sulawesi yang merupakan PKN diarahkan untuk mendorong “pengembangan Mamuju sebagai pusat pelayanan sekunder”.

Arah kebijakan menurut RPJPD Sulawesi Barat pada periode II secara garis besar adalah “pada periode ini dilakukan akselerasi untuk mendorong perekonomian yang sejahtera, wilayah daerah yang maju serta manusia dan masyarakat yang malaqbi. Fokus dari periode ini adalah akselerasi”.

Arah kebijakan menurut RTRW Sulawesi Barat secara garis besar adalah: pertama, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang, dengan strategi(1)strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:mempromosikan Pusat Kegiatan Nasional (PKNp) Mamuju (ibukota Kabupaten Mamuju) – Tampapadang - Belang Belang (MATABE) yang potensial berfungsi sebagai pusat kegiatan terpadu kepelabuhanan, kebandarudaraan, industri, perdagangan, pergudangan

dan peti kemas; Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Majene (ibukota Kabupaten Majene) sebagai kota pendidikan, Pasangkayu (ibukota Kabupaten Mamuju Utara) dan mempromosikan Polewali (ibukota Kabupaten Polewali Mandar) sebagai PKWp yang potensial dikembangkan menjadi agropolitan; Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Mamasa (ibukota Kabupaten Mamasa), Wonomulyo sebagai sentra lumbung beras, dan Topoyo yang dikembangkan sebagai Kota Terpadu Mandiri; dengan cara: a. Menjaga interkoneksi antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya; b. Meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi antarkawasan perkotaan, antara PKNp, PKW, PKWp dan PKL; c. meningkatkan sinergitas antar kawasan perkotaan baik PKNp MATABE, PKWp yang meliputi Majene Pasangkayu dan Polewali, PKL yang meliputi Mamasa, Wonomulyo dan Topoyo; d. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensil dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; e. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah pantai dan daerah irigasi teknis; dan f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih livable untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya, termasuk PKNp, PKWp dan PKL. (2) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi: a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi inter moda, baik darat, laut maupun udara; b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolasi; c. meningkatkan jaringanenergisecara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat-pusat kegiatan dan kawasan permukiman; d. meningkatkan sumber daya energi dengan lebih menumbuhkembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan; e. meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air; f. meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi yang terpadu dengan jaringan dalam tataran Nasional secara optimal.

Kedua, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang,terdiri dari (1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung meliputi:Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah (ecoregion) termasuk ekohidrolika DAS; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama sektor kehutanan, pertambangan dan kelautan. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah meliputi:

a. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, laut maupun udara, termasuk di dalam bumi; b. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% dari luas pulau. Luas dan sebaran kawasan berfungsi lindung perlu disesuaikan dengan keberadaan, karakteristik dan kondisi ekosistem DAS di pulau tersebut; dan c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah khususnya DAS kritis. Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah meliputi: a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah; b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; e. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan penerasi masa kini dan generasi masa depan; f. Mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumberdaya baru untuk penghasilan dan pelestarian lingkungan; g. Mengelola sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan h. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana. (2) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya,meliputi: a. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya; dan b. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi: a. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi untuk memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah; b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk

meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat; c. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; d. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan provinsi sebagai pendukung fungsi Sulawesi Barat sebagai lahan pangan berkelanjutan; e. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat; f. Mendukung kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia atau landasan kontinental untuk meningkatkan perekonomian nasional. Strategi untuk mengendalikan perkembangkan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi: a. Membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; b. memanfaatkan ruang pusat kota, terutama kota besar, dengan mengoptimalkan pembangunan gedung secara vertikal, dengan mempertimbangkan kerawanan terhadap gempa, agar terwujud kota taman yang kompak, di daerah perkotaan yang aman terhadap risiko bencana alam; c. menumbuhkembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi serta model rumah kebun di klaster sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan; d. mewujudkan kawasan hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS); e. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis; f. mengembangkan kegiatan budidaya kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

Ketiga, Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Sulawesi Barat dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: mengembangkan produktifitas sentra-sentra produksi pertanian, perikanan, serta agro industri dan agribisnis; Membangun prasarana wilayah pendukung kegiatan produktif; mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bermitra sejajar dalam perekonomian nasional atau internasional; mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama

pengembangan wilayah; menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan; mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan; meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi. Strategi dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi: mengembangkan kawasan pendidikan, pelestarian kearifan lokal, warisan sejarah dan budaya; mengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya. Strategi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi: budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan, mengembangkan sumberdaya baru pengganti bahan tambang yang akan habis. Strategi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: melestarikan ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung; menata ruang wilayah yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung.

Strategi pengembangan kawasan kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait peningkatan produktifitas sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, agroindustri dan agrobisnis meliputi: a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional atau internasional; b. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; c. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; d. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan; e. mengembangkan kawasan pertanian berkelanjutan berupa sawah irigasi teknis di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju terutama di KTM Topoyo, Kabupaten Polman yang dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen DAS terutama S. Kaluku, S. Karosa, S. Budong-Budong, S. Karama, S. Babalang, S. Tomo dan S. Lariang untuk wilayah Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju, serta S. Sa'dang, S. Maloso, S. Mandar dan S. Mapili untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar; f. Pengembangan kawasan-kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju, perkebunan kakao di seluruh wilayah Provinsi Sulbar, perkebunan jeruk Limau China di wilayah perbatasan kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju, perkebunan kelapa dalam di sepanjang pesisir Selat Makassar kecuali kawasan perkotaan, perkebunan kopi, teh dan hortikulura di Kabupaten Mamasa; g. Mengembangkan kawasan terpadu pelabuhan, industri,

pergudangan dan perdagangan Belang-Belang sebagai outlet dan pintu masuk komoditi dari dan ke seluruh wilayah Sulbar serta wilayah perbatasan provinsi tetangga.

Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait pembangunan prasarana wilayah pendukung kegiatan produktif meliputi: a. meningkatkan prasarana jalan untuk angkutan komoditi dari sentra – sentra produksi serta angkutan sarana produksi seperti pupuk, peralatan pertanian dan sebagainya ke sentra – sentra produksi; b. mengembangkan kawasan industri pengolahan komoditi dan pergudangan; c. mengembangkan prasarana wilayah lainnya seperti irigasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan sebagainya, sebagai pendukung kegiatan usaha pertanian hulu – hilir. Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan sosial budaya provinsi terkait pengembangan kawasan pendidikan dan pelestarian kearifan lokal, warisan sejarah dan meliputi: a. Kawasan wisata sosial budaya dan alam di Mamasa yang dipadu-selaraskan dengan rute wisatawan mancanegara dan nasional Bandara Tampapadang ke Mamasa dan Tana Toraja atau sebaliknya; b. Kegiatan wisata Budaya Mandar dapat dikembangkan di kawasan wisata di Kabupaten-kabupaten Matra, Mamuju, Majene dan Polman. Pusat wisata budaya Mandar yang mempertunjukkan musik, lagu dan tarian tradisional Mandar, menyajikan makanan dan minuman tradisional Mandar, juga sarung tenun tradisional Mandar, ditempatkan pada jalur wisatawan Mamuju-Mamasa-Toraja; Mengembangkan kota pendidikan Majene. Strategi pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya, meliputi: a. mengembangkan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya seperti: jalan, drainase, air bersih, jaringan listrik dan telekomunikasi; b. mengembangkan kampus – kampus perguruan tinggi serta sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama. Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi provinsi meliputi: a. mengembangkan kegiatan penunjang dan atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumberdaya dan atau teknologi tinggi; b. meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumberdaya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) meliputi: a. Blok minyak Suremana, Pasangkayu dan Kuma di Kabupaten Matra, Blok minyak Karama dan Budong Budong di Kabupaten Mamuju, Blok minyak Mandar di Kabupaten-kabupaten Majene dan Polman; b. PLTU Mamuju di Kalukku; c. PLTA Karama di Mamuju; d. PLT Hydrogen di Mamuju; e. KSP Bendungan-bendungan

yang terdiri atas Bendungan Sekka-Sekka di Kabupaten Polman dan Bendungan Tommo di Kabupaten Mamuju. Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi meliputi: a. menetapkan kawasan strategis provinsi berfungsi lindung; b. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan; c. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan lindung yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan d. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Nasional maupun Provinsi. Strategi pengembangan kawasan strategis Kepentingan Daya Dukung Lingkungan Provinsi meliputi pengembangan: a. Suaka Margasatwa Mampie dan Lampoko di Kabupaten Polewali Mandar; b. Suaka Margasarwa Kalumpang di Kabupaten Mamuju; c. Taman Nasional Ganda Dewata di Kabupaten Mamuju dan Mamasa; d. Kawasan perlindungan laut di sekitar P. Lumulumu dan P. Larilarian.

**Arah Kebijakan Umum Pembangunan Sulawesi Barat**

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam RPJMN, RPJPD dan RTRW maka arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Sulawesi Barat periode tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang tercermin dalam pelayanan yang semakin profesional dan cerdas serta efesien dan efektif sehingga tingkat layanan kepada masyarakat semakin memuaskan, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
2. Arah kebijakan umum untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasana serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dari semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan beberapa program yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti perbaikan infrastruktur dasar dan pemenuhan kebutan pangan.
3. Arah kebijakan umum untuk perkuatan sumberdaya manusia dibidang kesehatan ditandai dengan semakin meningkatnya angka harapan hidup masyarakat, dan semakin berkurangnya angka penduduk miskin serta pengangguran.
4. Arah kebijakan umum untuk perkuatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pendidikan yang ditandai dengan semakin tingginya rata-rata lama sekolah, pendidikan

anak usia dini, pembinaan kepemudaan dan keolahragaan, mendorong kesetaraan gender, semakin berkembangnya budaya lokal, meningkatnya kebijakan perlindungan anak dan perempuan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

5. Arah kebijakan umum untuk penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan semakin kondusifnya daya dukung lingkungan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pembangunan yang konsisten dengan RTRW Provinsi.

Sebagai tindak lanjut dalam mengimplementasikan strategi utama dan arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan implementasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat selama lima tahun. Adapun strategi dan kebijakan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 adalah:

**Misi 1: Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah.**

Fokus misi ini adalah dengan melaksanakan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai tugas pokok dan visi yang diemban SKPD.

Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini adalah:

1. Terwujudnya sumberdaya manusia aparatur yang berkualitas
2. Mewujudkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang yang handal dan profesional
3. Mewujudkan struktur kelembagaan dan ketata laksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
4. Mewujudkan budaya tata kerja aparatur Pemerintah yang profesional dan cerdas
5. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis kinerja
6. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian pembangunan
7. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan daerah dan stakeholder lainnya
8. Meningkatnya jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga domestik dan internasional utnk mendorong penanaman modal investasi keuangan, perkembangan ekonomi dan sektor-sektor lainnya
9. Meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur Pemerintah
10. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja
11. Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi

Arah kebijakan pembangunan untuk menjalankan strategi ini adalah:

1. Peningkatan dan pengembangan kualitas aparatur pada setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and good governance
2. Pengembangan kelembagaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
3. Perwujudan sinergi dan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang yang handal
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
5. Peningkatan pengendalian terhadap hasil-hasil monitoring dan evalauasi untuk menjamin tepat sasarnnya program-program pembangunan
6. Penataan organisasi dan ketata laksanakan pemerintah
7. Adanya standar operating prosedur bagi pelaksanaan tupoksi aparatur
8. Peningkatan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggung jawaban perhitungan APBDmenuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
9. Optimalisasi akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan
10. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum aparatur
11. Kerjasama pembangunan antar provinsi dan kabupaten, serta provinsi lain yang saling menguntungkan
12. Pembangunan komunikasi timbal balikPemerintah dan Stakeholder
13. Meningkatkan promosi keunggulan komparatif, wilayah dan sumber daya alam
14. Promosi tentang peluang, insentif dan profit dalam menanamkan modal disulawesi barat
15. Optimalisasi penyelenggaraan pelayananpublik;
16. Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana kerja
17. Peningkatan kemudahan akses publik terhadap data dan informasi pembangunan daerah
18. Perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi

**Misi 2: Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi.** Fokus misi ini dengan melaksanakan pengembangan sarana ekonomi vital yang memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan agroindustri, industri pertambangan minyak, gas dan mineral serta volume perdagangan.

Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini adalah:

1. Meningkatkan pembangunan jaringan jalandan jembatan pada semua wilayah
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan ke pusat-pusat produksi
3. Percepatan pembangunan bandar udara Tampa Padang dan sumarorong
4. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan energi dan ketenaga listrikan
5. Mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur irigasi dan air bersih
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan potensi bahari
8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan disemua wilayah
9. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian
10. Meningkatkan pemerataan pelayanan transportasi antar wilayah, baik antar provinsi maupun kabupaten
11. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana lalulintas sesuai standar pelayanan
12. Meningkatkan volume perdagangan dengan kemudahan perijinan dan jaminan kondisi wilayah yang kondusif
13. Meningkatkan jaringan perhubungan jalur darat dan laut
14. Meningkatkan nilai tukar petani dengan tetap menjaga kualitas panen dan kondisi pasar
15. Meningkatkan nilai tukar nelayandengan tetap menjaga kualitas dan kuantitas tangkapan dan kondisi pasar
16. Pemberdayaan pelaku UMKM
17. Pengembangan dan promosi destinasi wisata

Arah kebijakan pembangunan untuk menjalankan strategi ini adalah:

1. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan untuk peningkatan interkoneksi wilayah
2. Peningkatan akses jalan dan jembatan untuk usaha produktif bagi peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan, maupun daerah terpencil dan perbatasan
3. Peningkatan pembangunan bandara Tampa Padang dan Sumarorong
4. Peningkatan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
5. Pengembangan potensienergi baru dan terbarukan

6. Pemantapan kondisi jaringan irigasi dan air bersih guna meningkatan aktivitas ekonomi
7. Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PengairanLainnya
8. Pengembangan dan pemantapan infrastruktur untuk pengembangan potensi bahari
9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan mengantisipasi adanya lonjakan peserta didik akibat kebijakan wajar 9 tahun dan wajar 12 tahun
10. Meningkatkan pembangunan infrastruktur kesehatan di Mamuju sebagai pusat ibukota dan daerah lainnya
11. Meningkatkan pembangunan perumahan yang murah, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat
12. Prioritas pembangunan infrastruktur vital yang mendukung pertumbuhan ekonomi
13. Pemantapan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
14. Pengembangan infrastruktur transportasi perhubungan sesuai standar pelayanan
15. Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap member ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi
16. Menjaga stabilitas perekonomian daerah yang dasari oleh capaian indikator ekonomi
17. Peningkatan akses jalur darat dan laut untuk usaha produktif bagi peningkatan perekonomian masyarakat
18. Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian perikanan dan ternak serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan
19. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat
20. Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan
21. Peningkatan kemampuan nelayan dan penguatan lembaga pendukunganya dan peningkatan produktivitas
22. Pengembangan sarana prasarana pendukung nelayan
23. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga
24. Pembangunan infrastruktur kepariwisataan

25. Pengembangan Promosi dan pemasaran aset wisata
26. Pengembangan potensi wisata alam dan budaya

**Misi 3: Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan dan kualitas hidup.**

Fokus misi adalah upaya melaksanakan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.

Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini adalah:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
2. Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi pro poor melalui pemberdayaan masyarakat (Program Bangun Mandar)
3. Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi perlindungan sosial
4. Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin
5. Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur bagi masyarak miskin
6. Menurunkan persentase pengangguran dengan strategi pro job melalui pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya
7. Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil bahagia sejahtera
8. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan daerah.
9. Pengarustamaan gender dalam pembangunan
10. Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan
11. Meningkatkan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
12. Pengembangan wilayah dan pemukiman transmigrasi

Arah kebijakan Pembangunan untuk menjalankan strategi ini adalah:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Medis dan paramedis
2. Peningkatan kualitas status kesehatan masyarakat
3. Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup Sehat Pada Masyarakat
4. Peningkatan Pelayanan kesehatan pada Unit-Unit Pelayanan kesehatan
5. Peningkatan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin
6. Pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat mengakses segala sumber kehidupan yang layak

7. Dukungan terhadap pelaksanaan MP3KI
8. Pemberian bantuan untuk peningkatan produktivitas masyarakat miskin
9. Pemberian jaminan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan aksesibiltas terhadap pelayanan kesehatan,pendidikan dan lainnya
10. Dukungan terhadap pelaksanaan program keluarga harapan
11. Pemberian Modal usaha dan modal kerja bagi keluarga miskin
12. Perluasan akses dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin
13. Pemberian kemudahan akses masyarakat miskin terhadap modal usaha
14. Pemberian bantuan rumah layak huni, angkutan murah, air bersih dan sanitasi yang layak, listrik murah dan hemat,kehidupan masyarakat miskin perkotaan
15. Peningkatan kehidupan nelayan
16. Menciptakan lapangan kerja melalui investasi dan kegiatan padat karya
17. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, out-sourcing, pengupahan, PHK serta jaminan keselamatan kerja
18. Meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan wawasan kerja
19. Pembangunan Balai Latihan Kerja bertaraf international
20. Pembangunan berwawasan kependudukan berkelanjutan
21. Pengembangan keluarga kecil bahagia dan sejahtera
22. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, dengan ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat
23. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
24. Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
25. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
26. Peningkatan kelembagaan dan koordinasi perlindungan anak dan perempuan
27. Penetapan regulasi daerah tentang perlindungan anak dan perempuan
28. Penyusunan dokumen analisis situasi ibu dan anak
29. Dukungan terhadap pelaksanaan wilayah layak anak
30. Penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
31. Peningkaatan perlindungan dan jaminan sosial

32. Pengembangan kesejahteraan sosial dan kapasirtas SDM
33. Pengembangan Wilayah Transmigrasi
34. Pengembangan Transmigrasi Lokal

**Misi 4: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.**

Fokus misi ini adalah pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan yang utuh dan terpadu, khususnya pada penerapan kurikulum nasional berbasis sekolah, pembinaan moral, budi pekerti, karakter, bahasa, emosional, estetika serta sikap beragama dan spiritual, apresiasi seni-budaya dan pengembangan kreativitas pemuda dan olahraga serta kesetaraan gender.

Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini adalah:

1. Mewujudkan pendidikan anak usia pra sekolah
2. Mewujudkan pendidikan dasar 9 tahun dan 12 tahun
3. Meningkatnya akses dan pelayanan masyarakat terhadap pendidikan
4. Meningkatkan penuntasan buta aksara
5. Penyediaan bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat
6. Percepatan pembangunan Universitas Sulawesi Barat
7. Meningkatkan peran dan prestasi pemuda dalam pembangunan daerah
8. Meningkatkan prestasi olahraga dan seni
9. Pengembangan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal

Arah kebijakan Pembangunan untuk menjalankan strategi ini adalah:

1. Meningkatkan akses dan pelayanan masyrakat terhadap pendidikan anak usia dini
2. Meningkatkan akses dan mutu pelyanan pendidikan dasar 9 tahun
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar 12 tahun
4. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program WAJAR Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas
5. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru pada semua jalur dan jenjang pendidikan
7. Membuka akses pendidikan informal maupun non formal yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui program tuntas kecamatan

8. Peningkatan kemampuan dan budayabaca masyarakan dengan tersedianyabuku-buku yang berkualitas
9. Pembangunan perpustakaan daerah sampai tingkat desa
10. Perwujudan status PTN untuk Universitas Sulawesi Barat
11. Dukungan pendanaan terhadap pengembangan perguruan tinggi negeri
12. Peningkatan Kualitas Kepemudaan
13. Peningkatan sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan
14. Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam pembangunan;
15. Peningkatan kuantitas dan kualitas prestasi olahraga dan seni secara berkelanjutan
16. Peningkatan upaya revitalisasi dan pengelolaan aset sumberdaya budaya dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Sulawesi Barat
17. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan budaya pada perilaku kehidupan masyarakat
18. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah
19. Peningkatan apresiasi pemerintah, masyarakat dan swasta terhadap seni dan budaya lokal

**Misi 5: Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan penerapan kebijakan tersebut akan menjamin daya dukung lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.**

Fokus misi ini adalah pada upaya melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga aspek keberlanjutan tetap dapat terjaga demi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.

Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini adalah:

1. Mengoptimalkan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan
2. Membangun komitmen antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan
3. Terfasilitasinya percepatan eksplorasi minyak dan gas oleh pihak swasta
4. Mengembangkan kawasan konservasi laut dan perairan yang berkelanjutan;
5. Mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan dengan melakukan penyediaan bibit tanaman kehutanandan MPTS untuk penghijauan, rehabilitasi dan reklamasi lahan
6. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengamanan hutan oleh provinsi dan kab
7. Mengembangkan penataan ruang yang berkelanjutan

8. Meningkatkan Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana dan KesiapsiagaanBencana
9. Meningkatkan penanganan mitigasi bencana
10. Meningkatkan penanganan masalah strategis tanggap darurat
11. Meningkatkan penanggulangan pasca bencana
12. Meningkatkan pengembangan konservasi di kawasan DAS

Arah kebijakan Pembangunan untuk menjalankan strategi ini adalah:

1. Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup
2. Peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
3. Peningkatan peluang usaha pertambangan
4. Daya dukung investor dalam eksplorasi minya dan gas
5. Peningkatan pengembangan kawasan konservasi laut dan perairan dan pengelolaan lingkungan laut berbasis masyarakat
6. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumber Daya kelautan
7. Rehabilitasi, penghijauan dan reklamasi hutan dan lahan
8. Pemantapan Kawasan Hutan
9. Perlindungan Hutan dan konservasi sumberdaya Alam
10. Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan
11. Peningkatan koordinasi pengamanan hutan
12. Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dalam hal pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan serta penetapan kawasan hutan pada penataan ruang wilayah sesuai dengan peran dan fungsinya
13. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana
14. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup
15. Peningkatan kualitas dan efektivitas kebijakan dan program konservasi untuk mencapai kemantapan pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung
16. Peningkatan kesadaran masyarakat diwilayah-wilayah rawan bencana

17. Pembangunan infrastruktur dalam rangka pengurangan resiko bencana
18. Pemetaan wilayah rawan bencana
19. Pengembangan SOP penanganan tanggap darurat dipahami semua pihak
20. Pengembangan kelembagaan penanganan korban bencana
21. Meningkatkan penanganan Kedaruratan Korban Bencana di wilayah secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir dan terpadu
22. Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) secara terpadu
23. Restrukturisasi, rekonstruksi dan revitalisasi infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pasca bencana
24. Peningkatan kontrol di kawasan DAS

**Tabel 6.1**
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| **Misi 1:** | | | |
|---|---|---|---|
| **Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah.** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Mewujudkan kualitas kinerja aparatur yang cerdas dan profesional serta pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efesien dan produktif. | 1 Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien berdasarkan prinsip *Good Governance*; | 1 Terwujudnya sumberdaya manusia aparatur yang berkualitas. | 1 Peningkatan dan pengembangan kualitas aparatur pada setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and g*ood governance*; |
| | | | 2 Pengembangan kelembagaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur |
| | 2 Optimalisasi perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah, struktur ruang dan pola ruang wilayah | 2 Mewujudkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang yang handal dan profesional | 3 Perwujudan sinergi dan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang yang handal; |
| | | | 4 Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; |

| Misi 1: | | | |
|---|---|---|---|
| **Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah.** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| | | | 5 Peningktan pengendalian terhadap hasil-hasil monitoring dan evalauasi untuk menjamin tepat sasarnnya program-program pembangunan |
| | 3 Terwujudnya penata laksanaan sistem, prosedur maupun tata kerja birokrasi yang berkualitas | 3 Mewujudkan struktur kelembagaan dan ketata laksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | 6 Penataan organisasi dan ketata laksanakan pemerintah |
| | | 4 Mewujudkan budaya tata kerja aparatur Pemerintah yang profesional dan cerdas; | 7 Adanya standar operating prosedur bagi pelaksanaan tupoksi aparatur |
| | 4 Terwujudnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan | 5 Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis kinerja. | 8 Peningkatan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggung jawaban perhitungan APBDmenuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP); |
| | | | 9 Optimalisasi akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan; |
| | 5 Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum. | 6 Mewujudkan pengawasan dan pengendalian pembangunan; | 10 Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum aparatur. |
| | 6 Meningkatnya kerjasama antar daerah atau lembaga lainnya dalam pembangunan | 7 Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan daerah dan stakeholder lainnya | 11 Kerjasama pembangunan antar provinsi dan kabupaten, serta provinsi lain yang saling menguntungkan; |
| | | | 12 Pembangunan komunikasi timbal balikPemerintah dan Stakeholder; |

| Misi 1: | | | |
|---|---|---|---|
| **Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah.** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| | | 8 Meningkatnya jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga domestik dan internasional utnk mendorong penanaman modal investasi keuangan, perkembangan ekonomi dan sektor-sektor lainnya | 13 Meningkatkan promosi keunggulan komparatif, wilayah dan sumber daya alam |
| | | | 14 Promosi tentang peluang, insentif dan profit dalam menanamkan modal disulawesi barat |
| | 7 Terwujudnya pelayanan prima yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. | 9 Meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur Pemerintah; | 15 Optimalisasi penyelenggaraan pelayananpublik; |
| | | 10 Meningkatkan sarana dan prasarana kerja; | 16 Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana kerja |
| | 8 Terwujudnya data dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi | 11 Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi | 17 Peningkatan kemudahan akses publik terhadap data dan informasi pembangunan daerah; |
| | | | 18 Perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi |

| Misi 2: | | | |
|---|---|---|---|
| **Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Menyediakan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan perekonomian | 1 Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk kelancaran transportasi ke pusat-pusat produksi | 1 Meningkatkan pembangunan jaringan jalandan jembatan pada semua wilayah | 1 Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan untuk peningkatan interkoneksi wilayah |

| Misi 2: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi** | | | | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | | **Strategi** | | **Kebijakan** | |
| | | | 2 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan ke pusat-pusat produksi | 2 | Peningkatan akses jalan dan jembatan untuk usaha produktif bagi peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan, maupun daerah terpencil dan perbatasan; |
| | 2 | Terselesaikannya pembangunan bandara Tampa Padang dan sumarorong | 3 | Percepatan pembangunan bandar udara Tampa Padang dan sumarorong | 3 | Peningkatan pembangunan bandara Tampa Padang dan Sumarorong |
| | 3 | Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur energi listrik | 4 | Meningkatkan pembinaan dan pengembangan energi dan ketenaga listrikan; | 4 | Peningkatan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan; |
| | | | 5 | Mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan | 5 | Pengembangan potensienergi baru dan terbarukan; |
| | 4 | Tersedianya infrastruktur irigasi dan air bersih | 6 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur irigasi dan air bersih | 6 | Pemantapan kondisi jaringan irigasi dan air bersih guna meningkatan aktivitas ekonomi; |
| | | | | | 7 | Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PengairanLainnya; |
| | 5 | Tersedianya infrastruktur untuk pengembangan potensi bahari | 7 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan potensi bahari | 8 | Pengembangan dan pemantapan infrastruktur untuk pengembangan potensi bahari |
| | 6 | Terpenuhinya infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan | 8 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan disemua wilayah | 9 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan mengantisipasi adanya lonjakan peserta didik akibat kebijakan wajar 9 tahun dan wajar 12 tahun |
| | | | | | 10 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur kesehatan di Mamuju sebagai pusat ibukota dan |

| Misi 2: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi** | | | | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | | **Strategi** | | **Kebijakan** | |
| | | | | | | daerah lainnya |
| | | | | | 11 | Meningkatkan pembangunan perumahan yang murah, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat |
| | 7 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar | 9 | Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian; | 12 | Prioritas pembangunan infrastruktur vital yang mendukung pertumbuhan ekonomi |
| | | | 10 | Meningkatkan pemerataan pelayanan transportasi antar wilayah, baik antar provinsi maupun kabupaten; | 13 | Pemantapan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa; |
| | | | 11 | Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana lalulintas sesuai standar pelayanan; | 14 | Pengembangan infrastruktur transportasi perhubungan sesuai standar pelayanan |
| | 8 | Meningkatnya volume perdagangan | 12 | Meningkatkan volume perdagangan dengan kemudahan perijinan dan jaminan kondisi wilayah yang kondusif | 15 | Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap member ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi |
| | | | | | 16 | Menjaga stabilitas perekonomian daerah yang dasari oleh capaian indikator ekonomi |
| | 9 | Terselenggaranya perhubungan darat dan laut | 13 | Meningkatkan jaringan perhubungan jalur darat dan laut | 17 | Peningkatan akses jalur darat dan laut untuk usaha produktif bagi peningkatan perekonomian masyarakat |

| Misi 2: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi** | | | | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | | **Strategi** | | **Kebijakan** | |
| | 10 | Meningkatnya nilai tukar petani | 14 | Meningkatkan nilai tukar petani dengan tetap menjaga kualitas panen dan kondisi pasar | 18 | Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian perikanan dan ternak serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan |
| | | | | | 19 | Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat |
| | | | | | 20 | Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan |
| | 11 | Meningkatnya nilai tukar nelayan | 15 | Meningkatkan nilai tukar nelayandengan tetap menjaga kualitas dan kuantitas tangkapan dan kondisi pasar | 21 | Peningkatan kemampuan nelayan dan penguatan lembaga pendukunganya dan peningkatan produktivitas. |
| | | | | | 22 | Pengembangan sarana prasarana pendukung nelayan |
| | 12 | Meningkatnya keberdayaan pelaku UMKM. | 16 | Pemberdayaan pelaku UMKM | 23 | Peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga |
| | 13 | Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan internasional | 17 | Pengembangan dan promosi destinasi wisata | 24 | Pembangunan infrastruktur kepariwisataan |
| | | | | | 25 | Pengembangan Promosi dan pemasaran aset wisata |
| | | | | | 26 | Pengembangan potensi wisata alam dan budaya |

| Misi 3: |
|---|
| **Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan dan Kualitas Hidup** |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---|---|---|---|
| Terwujudnya akses dan kualitas layanan kesehatan dan kualitas hidup | 1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak | 1 Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan | 1 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Medis dan paramedis |
| | | | 2 Peningkatan kualitas status kesehatan masyarakat; |
| | | | 3 Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup Sehat Pada Masyarakat; |
| | | | 4 Peningkatan Pelayanan kesehatan pada Unit-Unit Pelayanan kesehatan; |
| | 2 Menurunnya persentase penduduk miskin | 2 Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi pro poor melalui pemberdayaan masyarakat (Program Bangun Mandar) | 5 Peningkatan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin |
| | | | 6 Pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat mengakses segala sumber kehidupan yang layak |
| | | | 7 Dukungan terhadap pelaksanaan MP3KI |
| | | 3 Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi perlindungan sosial | 8 Pemberian bantuan untuk peningkatan produktivitas masyarakat miskin |
| | | | 9 Pemberian jaminan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan aksesibiltas terhadap pelayanan kesehatan,pendidikan dan lainnya. |
| | | | 10 Dukungan terhadap pelaksanaan program keluarga harapan |
| | | 4 Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin | 11 Pemberian Modal usaha dan modal kerja bagi keluarga miskin |
| | | | 12 Perluasan akses dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin |

| Misi 3: | | | |
|---|---|---|---|
| **Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan dan Kualitas Hidup** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| | | | 13 Pemberian kemudahan akses masyarakat miskin terhadap modal usaha |
| | | 5 Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur bagi masyarak miskin | 14 Pemberian bantuan rumah layak huni, angkutan murah, air bersih dan sanitasi yang layak, listrik murah dan hemat,kehidupan masyarakat miskin perkotaan |
| | | | 15 Peningkatan kehidupan nelayan |
| | 3 Menurunnya persentase pengangguran | 6 Menurunkan persentase pengangguran dengan strategi pro job melalui pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya | 16 Menciptakan lapangan kerja melalui investasi dan kegiatan padat karya |
| | | | 17 Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, out-sourcing, pengupahan, PHK serta jaminan keselamatan kerja |
| | | | 18 Meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan wawasan kerja |
| | | | 19 Pembangunan Balai Latihan Kerja bertaraf international |
| | 4 Mewujudkan Pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera | 7 Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil bahagia sejahtera | 20 Pembangunan berwawasan kependudukan berkelanjutan |
| | | | 21 Pengembangan keluarga kecil bahagia dan sejahtera |

| Misi 3: | | | |
|---|---|---|---|
| **Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan dan Kualitas Hidup** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| | 5 Mewujudkan pengarustamaan gender,perlindungan anak dan perempuan, serta penanganan PMKS | 8 Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan daerah | 22 Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, dengan ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat |
| | | | 23 Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik |
| | | | 24 Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi |
| | | 9 Pengarustamaan gender dalam pembangunan | 25 Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender |
| | | 10 Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan | 26 Peningkatan kelembagaan dan koordinasi perlindungan anak dan perempuan |
| | | | 27 Penetapan regulasi daerah tentang perlindungan anak dan perempuan |
| | | | 28 Penyusunan dokumen analisis situasi ibu dan anak |
| | | | 29 Dukungan terhadap pelaksanaan wilayah layak anak |
| | | 11 Meningkatkan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial | 30 Penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial |

| Misi 3: | | | |
|---|---|---|---|
| **Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan dan Kualitas Hidup** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| | | | 31 Peningkaatan perlindungan dan jaminan sosial |
| | | | 32 Pengembangan kesejahteraan sosial dan kapasirtas SDM |
| | 6 Peningkatan Taraf Hidup Transmigran | 12 Pengembangan wilayah dan pemukiman transmigrasi | 33 Pengembangan Wilayah Transmigrasi |
| | | | 34 Pengembangan Transmigrasi Lokal |

| Misi 4 | | | |
|---|---|---|---|
| **Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan | 1 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan anak usia dini | 1 Mewujudkan pendidikan anak usia pra sekolah | 1 Meningkatkan akses dan pelayanan masyrakat terhadap pendidikan anak usia dini |
| | 2 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun | 2 Mewujudkan pendidikan dasar 9 tahun dan 12 tahun | 2 Meningkatkan akses dan mutu pelyanan pendidikan dasar 9 tahun |
| | | | 3 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar 12 tahun |
| | | 3 Meningkatnya akses dan pelayanan masyarakat terhadap pendidikan | 4 Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program WAJAR Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas |
| | | | 5 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; |

| Misi 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan** | | | | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | | **Strategi** | | **Kebijakan** | |
| | | | | | 6 | Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru pada semua jalur dan jenjang pendidikan; |
| | 3 | Terwujudnya pemberantasan buta aksara; | 4 | Meningkatkan penuntasan buta aksara | 7 | Membuka akses pendidikan informal maupun non formal yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui program tuntas kecamatan |
| | 4 | Meningkatnya minat baca masyarakat | 5 | Penyediaan bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat | 8 | Peningkatan kemampuan dan budayabaca masyarakan dengan tersedianyabuku-buku yang berkualitas; |
| | | | | | 9 | Pembangunan perpustakaan daerah sampai tingkat desa |
| | 5 | Terwujudnya pembangunan Universitas Sulawesi Barat | 6 | Percepatan pembangunan Universitas Sulawesi Barat; | 10 | Perwujudan status PTN untuk Universitas Sulawesi Barat |
| | | | | | 11 | Dukungan pendanaan terhadap pengembangan perguruan tinggi negeri |
| | 6 | Meningkatnya peran dan prestasi pemuda, olahraga dan seni | 7 | Meningkatkan peran dan prestasi pemuda dalam pembangunan daerah. | 12 | Peningkatan Kualitas Kepemudaan |
| | | | | | 13 | Peningkatan sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan |
| | | | | | 14 | Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam pembangunan; |
| | | | 8 | Meningkatkan prestasi olahraga dan seni | 15 | Peningkatan kuantitas dan kualitas prestasi olahraga dan seni secara berkelanjutan; |
| | 7 | Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sumberdaya budaya | 9 | Pengembangan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal | 16 | Peningkatan upaya revitalisasi dan pengelolaan aset sumberdaya budaya dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Sulawesi Barat |

| Misi 4 | | | |
|---|---|---|---|
| **Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| | | | 17 Penguatan nilai-nilai keagamaan dan budaya pada perilaku kehidupan masyarakat |
| | | | 18 Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah |
| | | | 19 Peningkatan apresiasi pemerintah, masyarakat dan swasta terhadap seni dan budaya lokal |

| **Misi 5: Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam terpadu untuk pembangunan berkelanjutan | 1 Pemanfaatan potensi tambang dengan memperhatikan kondisi lingkungan | 1 Mengoptimalkan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan | 1 Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup; |
| | | 2 Membangun komitmen antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan; | 2 Peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber dayaalam dan lingkungan hidup; |
| | | | 3 Peningkatan peluang usaha pertambangan; |
| | 2 Terselenggaranya percepatan eksplorasi minyak dan gas | 3 Terfasilitasinya percepatan eksplorasi minyak dan gas oleh pihak swasta | 4 Daya dukung investor dalam eksplorasi minya dan gas |
| | 3 Pengembangan kawasan konservasi laut dan perairan yang berkelanjutan | 4 Mengembangkan kawasan konservasi laut dan perairan yang berkelanjutan; | 5 Peningkatan pengembangan kawasan konservasi laut dan perairan dan pengelolaan lingkungan laut berbasis masyarakat; |

| Misi 5: Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. | | | |
|---|---|---|---|
| **Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| | | | 6 Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumber Daya kelautan; |
| | 4 Berkurangnya luas lahan kritis | 5 Mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan dengan melakukan penyediaan bibit tanaman kehutanandan MPTS untuk penghijauan, rehabilitasi dan reklamasi lahan; | 7 Rehabilitasi, penghijauan dan reklamasi hutan dan lahan; |
| | | | 8 Pemantapan Kawasan Hutan; |
| | | | 9 Perlindungan Hutan dan konservasi sumberdaya Alam; |
| | | | 10 Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan |
| | | 6 Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengamanan hutan oleh provinsi dan kab; | 11 Peningkatan koordinasi pengamanan hutan |
| | 5 Penerapan tata ruang wilayah yang berkelanjutan | 7 Mengembangkan penataan ruang yang berkelanjutan | 12 Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dalam hal pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan serta penetapan kawasan hutan pada penataan ruang wilayah sesuai dengan peran dan fungsinya |
| | 6 Rendahnya tingkat pencemaran dan resiko bencana; | 8 Meningkatkan Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana dan KesiapsiagaanBencana; | 13 Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana |

| Misi 5: Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. | | | |
|---|---|---|---|
| **Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| | | | 14 Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup |
| | | 9 Meningkatkan penanganan mitigasi bencana; | 15 Peningkatan kualitas dan efektivitas kebijakan dan program konservasi untuk mencapai kemantapan pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung |
| | | | 16 Peningkatan kesadaran masyarakat diwilayah-wilayah rawan bencana |
| | | | 17 Pembangunan infrastruktur dalam rangka pengurangan resiko bencana |
| | | | 18 Pemetaan wilayah rawan bencana |
| | 7 Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana; | 10 Meningkatkan penanganan masalah strategis tanggap darurat; | 19 Pengembangan SOP penanganan tanggap darurat dipahami semua pihak |
| | | | 20 Pengembangan kelembagaan penanganan korban bencana |
| | | | 21 Meningkatkan penanganan Kedaruratan Korban Bencana di wilayah secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir dan terpadu; |
| | | | 22 Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) secara terpadu; |

| Misi 5: Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. | | | |
|---|---|---|---|
| **Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| | | 11 Meningkatkan penanggulangan pasca bencana | 23 Restrukturisasi, rekonstruksi dan revitalisasi infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pasca bencana |
| | 8 Pengembangan Kawasan Konservasi DAS | 12 Meningkatkan pengembangan konservasi di kawasan DAS | 24 Peningkatan kontrol di kawasan DAS |